

telinga (1,2%), gizi buruk (3,28%). Sedangkan cakupan pada bulan Januari-September 2009 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1 Cakupan Pelayanan MTBS Berdasarkan Puskesmas Di Kabupaten Pasuruan bulan Januari-September Tahun 2009

No	Puskesmas	Bulan Januari-September 2009		
		Kunjungan balita	MTBS	%
1	Grati	2035	124	6,2
2	Wonorejo	1247	98	7,8
3	Purwosari	1136	371	25,4
4	Gondang Wetan	414	86	20,7
5	Nguling	1436	658	45,3
6	Prigen	2631	401	15,2
7	Purwodadi	716	174	24,3
8	Gempol	1220	528	43,2
9	Kejayan	1136	711	62,6
10	Sukorejo	1271	117	9,20
11	Lekok	974	401	41,1
12	Pandaan	1080	523	48,2
13	Ngempit	1912	1247	65,2
14	Nongko Jajar	446	84	19
15	Winongan	986	542	54
16	Beji	2271	928	40,86
17	Ambal-ambil	952	141	14,8
Jumlah		21622	7134	33

Sumber: Data Kasie Kesga Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan bulan Januari-September Tahun 2009

Tabel 1.1 menunjukkan pencapaian target MTBS masih dibawah target pelayanan MTBS yang ditetapkan Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan yaitu 80%.

Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan telah melaksanakan beberapa upaya dalam mengembangkan pelaksanaan kegiatan MTBS di Puskesmas, antara lain: 1). Pemenuhan Modul MTBS di tingkat pelayanan kesehatan dasar. 2). Pelatihan MTBS bagi tenaga kesehatan di Puskesmas Kabupten Pasuruan. 3). Penyegaran tim MTBS. 4). Memasukkan MTBS di dalam PWS KIA. 5). Monitoring dan evaluasi tahunan program MTBS di Puskesmas Pasuruan.

Untuk melihat berhasil tidaknya program MTBS di Puskesmas diperlukan sikap dan tanggap bagi petugas pelaksana pemegang program MTBS, dalam hal ini bentuk sikap

dan tanggap dapat dilihat dalam kinerja petugas MTBS dalam memberikan pelayanan MTBS kepada balita sakit. Selain itu adanya SDM terlatih, sarana prasarana yang memadai dalam mendukung pelayanan program MTBS, adanya dana yang dimiliki serta adanya keterlibatan kerjasama lintas program dan sektor dari pemerintah, dan yang paling penting adalah adanya pembinaan dari Dinas Kesehatan setempat merupakan faktor yang menunjang dalam keberhasilan program MTBS.

Berjalan baik atau tidaknya sebuah program dipengaruhi oleh beberapa variabel yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi/sikap pelaksana kebijakan dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut saling mendukung dan mempengaruhi sebuah kebijakan.

Kebijakan merupakan keputusan yang dibuat oleh suatu lembaga pemerintah atau organisasi dan bersifat mengikat para pihak yang terkait dengan lembaga tersebut.¹³ Dalam suatu kebijakan adanya komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi merupakan faktor penting dalam terlaksananya suatu program. Komunikasi diperlukan agar materi yang ada dapat tersampaikan dengan baik sehingga apa yang menjadi tujuan dan sasaran program dapat tercapai. Implementasi kebijakan juga akan efektif bila tersedia sumber daya manusia dan sumber daya finansial yang kompeten. Disposisi dan struktur organisasi juga mempengaruhi implementasi kebijakan.

Hasil presurvey untuk mendukung adanya dugaan mengenai belum optimalnya implementasi MTBS di Kabupaten Pasuruan yang peneliti lakukan pada tanggal 5-11 November 2009 kepada 3 Puskesmas secara acak diperoleh informasi bahwa hanya Puskesmas Winongan yang kegiatan MTBSnya berjalan walaupun belum maksimal, sedangkan 2 Puskesmas (Ambal-ambil, Purwosari) belum berjalan seperti yang diharapkan. Puskesmas Winongan telah melakukan sosialisasi MTBS kepada pihak terkait (bidan desa dan kader), untuk kegiatan sosialisasi MTBS Puskesmas harus menyediakan waktu, tenaga, dan dana sendiri karena untuk sosialisasi selama ini tidak pernah ada suntikan dana dari Dinas Kesehatan setempat. Puskesmas Winongan sudah memiliki poli MTBS sendiri, serta

alur pelayanan, formulir MTBS tidak disediakan oleh dinas, sehingga Puskesmas harus pengadaan sendiri, petugas lama yang telah dilatih MTBS belum mendapat penyegaran kembali tentang perkembangan MTBS terbaru, selama 2 tahun diterapkan MTBS DKK Pasuruan tidak pernah melakukan supervisi khusus program MTBS, akan tetapi supervisi terpadu dengan program lain dan tidak pernah ada umpan balik dari kegiatan tersebut. Sedangkan Puskesmas yang lain adalah Puskesmas Ambal-ambil, beberapa kendala yang dialami Puskesmas Ambal-ambil adalah dokter Puskesmas yang sudah diberi penyegaran MTBS terbaru pindah di Puskesmas lain sedangkan dokter Puskesmas yang baru belum pernah dilatih MTBS sehingga kegiatan MTBS hanya dilakukan oleh bidan yang juga memberi layanan KIA/KB akibatnya tidak semua balita yang berkunjung tertangani dengan MTBS, karena dengan melakukan MTBS sesuai SOP membutuhkan waktu yang lama, sehingga petugas enggan melakukan MTBS, pengisian formulir MTBS tidak diisi secara lengkap. terbatasnya sarana prasarana tempat pelayanan khusus untuk MTBS yaitu satu ruangan dengan program KIA sehingga pemeriksaan kurang kondusif. Penelitian ini bertujuan melihat peran faktor dalam implementasi program MTBS di Puskesmas Kabupaten Pasuruan.

A. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas diketahui bahwa meskipun dukungan pimpinan, rencana kerja dan standar pelayanan sudah disiapkan, dan lebih dari setengah Puskesmas di Kabupaten Pasuruan sudah dilatih MTBS, namun pencapaian MTBS tahun 2007 hanya 32,91%, tahun 2008 pencapaian MTBS mengalami penurunan hanya 30,77%. Bulan Januari-September 2009 sebesar 28,83%. Ada kesenjangan antara perencanaan program MTBS dengan implementasinya di Puskesmas. Apa yang diprogramkan belum sepenuhnya dapat diterapkan pada unit pelaksana. Hal ini dibuktikan bahwa belum semua balita sakit yang berkunjung di Puskesmas dilayani dengan MTBS oleh petugas. Program MTBS juga

belum sepenuhnya memenuhi standart sebuah pelayanan balita sakit yang ditetapkan WHO. Pemerintah belum menyediakan sumber-sumber penting dalam implementasi kebijakan program MTBS yang meliputi dana, tenaga yang memadai dan mempunyai keahlian untuk melaksanakan tugas, fasilitas yang diperlukan untuk pelayanan, serta kurang adanya supervisi.

Dari paparan di atas menunjukkan bahwa realitas implementasi program MTBS belum berjalan seperti yang diharapkan. Adapun faktor-faktor implementasi yang diduga menjadi penyebabnya antara lain dari aspek komunikasi, sumber daya, disposisi serta struktur birokrasi. Oleh karena itu, peneliti ingin melakukan analisis terhadap implementasi program MTBS khususnya di Puskesmas wilayah Kabupaten Pasuruan.